

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON
Jln Sunan Muria No. 04 Sumber**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan program pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022.

Semoga Dokumen ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumber, Juli 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
CIREBON

H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19670208 199403 1 013



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 509 -Disdukcapil/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 15);
24. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.34- Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 151.1/1756/Bappelitbangda tanggal 2 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 2. Surat Kepala Bappelitbangda / Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 051.2.PPM/2022 tanggal 24 Juli 2022 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar indikator, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
 - d. sebagai indikator dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022,
- KEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome*
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output*

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2020	9
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Tahun 2020.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	44
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB IV PENUTUP	72

LAMPIRAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.509-Disdukcapil/2022

TANGGAL : 07 Oktober 2022

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Sebagai suatu dokumen resmi yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan tegas bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang

dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk. Dalam hal ini yang dimaksud adalah instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan untuk tingkat kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai komitmen mewujudkan Sistem administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan berjalan baik dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pelayanan publik serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan Renstra PD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra PD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RKA/DPA;

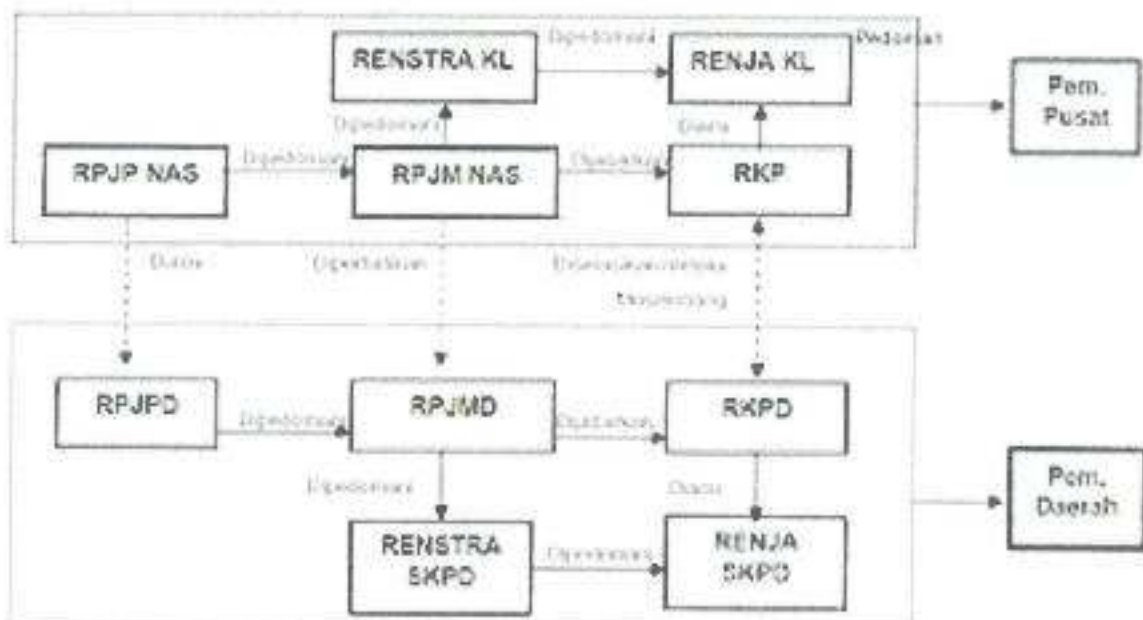
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PD; untuk memastikan RKA telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
4. Pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
6. Penetapan Rencana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya perlu menyusun rencana kerja sebagai bentuk perencanaan untuk menyelaraskan pelaksanaan program kegiatan dan merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kerja anggaran dinas pada tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas.

Bagan Keterkaitan Renja PD dengan RKP, Renstra PD, Renja K/L



2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136)
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781)
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- q. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- s. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
- t. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah

- a. sebagai dokumen perubahan perencanaan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2022 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

- b. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan tujuan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sector, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
- d. Sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indicator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.4 Riview terhadap Rancangan Perubahan RKPD
 - 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kerja Kegiatan Masyarakat
- Bab III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas
 - 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI, ANALISIS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2022

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTER I TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan.
- 2) Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap.

a) Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja semester 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,645,053,900	628,787,540	38.22%	1,016,266,360
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	882,659,200	380,590,120	42.64%	512,069,080
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	878,432,500	372,643,220	42.52%	503,789,280
1	Pencatatan, Penalauasaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	805,133,000	335,075,560	41.99%	487,057,440
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8,575,000	5,425,000	63.27%	3,150,000
3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	62,724,500	29,142,560	46.46%	33,581,940
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16,228,700	7,946,900	48.97%	8,279,800
4	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	16,228,700	7,946,900	48.97%	8,279,800
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	332,203,500	138,074,840	41.56%	194,128,660
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	332,203,500	138,074,840	41.56%	194,128,660
5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	305,889,600	123,292,040	40.31%	182,597,560
6	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	25,313,900	14,782,800	58.38%	11,531,100

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	372,389,200	97,976,360	26.31%	274,412,840
4	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	76,805,200	16,040,000	20.88%	60,765,200
7	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	34,927,000	9,675,000	27.70%	25,252,000
8	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	41,878,200	6,365,000	15.20%	35,513,200
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	295,584,000	81,836,360	27.72%	213,647,640
9	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	295,584,000	81,936,360	27.72%	213,647,640
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780
6	Penyusunan Profil Kependudukan	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780
10	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780

Pencapaian indikator kinerja pada semester I Tahun 2022 urusan ini adalah meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebanyak 102.145 lembar dari target 260.000 lembar atau sebesar 39,41%, cakupan penerbitan KTP Elektronik sebanyak 76.835 keping dari target 250.000 keping atau sebesar 30,73%, Cakupan Surat Pindah Datang sebanyak 17.942 lembar dari target 27.000 lembar atau sebesar 66,45%, Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebanyak 27.967 lembar dari target 65.000 lembar atau sebesar 43,93 %,

Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut : **Tabel Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	TARGET 2022	PENCAPAIAN smstr I / 2022
1	Penerbitan Kartu Keluarga	220.000	102.457
2	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	200.000	76.835
3	Surat Pindah Datang	27.000	17.942
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	100.000	38.524
5	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65.000	27.967

NO	KEGIATAN	TARGET 2022	PENCAPAIAN smstr I / 2022
6	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	1.200	2.428
7	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	Akta Perkawinan	50	6
	Akta Perceraian	10	1
	Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan ANak	25	5

Sumber : Data Simonek Semester I Tahun 2022

b) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Alokasi anggaran untuk Program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 892.659.200,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar Rp. 380.590.120,- sisa sebesar Rp. 512.069.080,- atau tercapai sebesar 42,64%.

Outcome Program ini adalah Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA, Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK) dan Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP EI

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp.876.432.500,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar RP.372.643.220,- sisa sebesar Rp. 503.789.280,- atau tercapai sebesar 42,52%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan

Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.805.133.000,- dan terealisasi sebesar Rp.338.075.560,- sisa sebesar Rp.467.057.440,- atau tercapai sebesar 41,99%.
Sub Outputnya adalah Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA), Terbitnya Kartu Keluarga
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.575.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.425.000,- sisa sebesar Rp 3.150.000,- atau tercapai sebesar 85,47%
Sub Outputnya adalah Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP El
 - c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.724.500,- dan terealisasi sebesar Rp.29.142.660,- sisa sebesar Rp.33.581.840,- atau tercapai sebesar 46,46%
Sub Outputnya adalah Jumlah pemohon yang menerima layanan Surat keterangan pindah, datang, SKTT.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 16.226.700,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar RP. 7.946.900,- sisa sebesar Rp. 8.279.800,- atau tercapai sebesar 48,97%.
- Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan
- Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.226.700,- dan terealisasi sebesar Rp.7.946.900,- sisa sebesar Rp. 8.279.800,- atau tercapai sebesar 48,97%.

Sub Outputnya adalah Jumlah warga yang terfasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon

2. Program Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran untuk Program Pencatatan Sipil sebesar Rp.332.203.500,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar Rp.138.074.840,- sisa sebesar Rp.5.779.330,- atau tercapai sebesar 41,56%.

Outcome Program ini adalah Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAK, Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan (Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar Rp.332.203.500,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar Rp.138.074.840,- sisa sebesar Rp.5.779.330,- atau tercapai sebesar 41,56%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 305.889.600,- dan terealisasi sebesar Rp.123.292.040,- sisa sebesar Rp.182.597.560,- atau tercapai sebesar 40,31%.

Sub Outputnya adalah Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran, Terbitnya Dokumen Akta Kematian, Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan, Terbitnya Dokumen Akta perceraian, Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak

- b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.313.90,- dan terealisasi sebesar Rp.14.782.800,- sisa sebesar Rp.11.531.100,- atau tercapai sebesar 56,18%

Sub Outputnya adalah Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP El

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.372.389.200,- dan terealisasi sebesar Rp.97.976.360,- sisa sebesar Rp.274.412.840,- atau tercapai sebesar 84,24%.

Outcome Program ini adalah Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan telah didukung dengan Aplikasi khusus dan Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.76.805.200,- dan terealisasi sebesar Rp.16.040.000,- sisa sebesar Rp. 76.805.200,- atau tercapai sebesar 20,88%

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.927.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.675.000,- sisa sebesar Rp.25.252.000,- atau tercapai sebesar 27,70%.

Sub Outputnya adalah Dokumen Database Penduduk yang Valid.

- b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.878.200,- dan terealisasi sebesar Rp.6.365.000,- sisa sebesar Rp.35.513.200,- atau tercapai sebesar 15,20%

Sub Outputnya adalah Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.295.584.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2022 sebesar Rp.81.936.360,- sisa sebesar Rp.213.647.640,- atau tercapai sebesar 27,72%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang terselenggara.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.295.584.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2022 sebesar Rp.81.936.360,- sisa sebesar Rp.213.647.640,- atau tercapai sebesar 27,72%
- Sub Outputnya** adalah Terpelihara dan Terkoneksinya SIAK Online Di 40 Kecamatan dan 1 Dinas

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar Rp.47.802.000,- dan terealisasi semetsre I Tahun 2022 sebesar Rp.12146220,- sisa sebesar Rp.35.655.780,- atau tercapai sebesar 25,41%.

Outcome Program ini adalah Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.47.802.000,- dan terealisasi semetsre I Tahun 2022 sebesar Rp.12146220,- sisa sebesar Rp.35.655.780,- atau tercapai sebesar 25,41%..

Output Kegiatan ini Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.802.000,- dan terealisasi semetsre I Tahun 2022 sebesar Rp.12146220,- sisa sebesar Rp.35.655.780,- atau tercapai sebesar 25,41%.

Sub Outputnya adalah Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir.

TABEL 1
TABEL EVALUASI RENJA PD TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN 2022 S.D SEMESTER I (TW II)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9-7+8	10-9/5 X 100%						
	Meningkatnya pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat												
	PROGRAM PERUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	32,389,980,800	55.59	4,916,949,545	165	90,286,261,300	85	17,967,100,750	250	48,253,362,050	294%	149%
			Prosentase Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipenuhi	90		53.49		170		90		260		789%	
			Prosentase Peningkatan Laporan keuangan yang telah dipenuhi dari yang seharusnya	90		83.33		170		90		260		289%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	2	37,500,000	1.5	14,005,400	4	58,069,500	2	27,088,800	6	85,158,100	300%	227%
			Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan												

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Koalisi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja yang diselesaikan (LPH, LKP, LAKIP, IKU dan PERKIN)	5	50,000,000	5	4,170,300	7	21,757,700	5	11,000,000	12	32,757,700	240%	66%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselainya Dokumen Laporan IKM	1	135,000,000	0.5	5,724,800	2	31,334,100	1	17,704,000	3	49,038,100	300%	36%
			Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1		0.5		7		1		3		300%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / laporan Administrasi Keuangan yang dibuat												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang membayar gaji dan Tunjangan setiap bulan	63	10,066,000,000	50	2,839,166,078	126	8,082,096,000	63	7,007,616,000	189	15,089,712,000	300%	150%
			Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26		13		26		26		52		200%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1	15,000,000	1	3,127,000	7	11,204,200	1	3,877,000	3	15,061,200	300%	101%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang diselesaikan	18	10,000,000	0	0	19	8,119,000	18	2,786,400	37	16,905,400	206%	109%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan Kantor												

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Revisi Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	15	30,000,000	5	3,967,700	20	21,907,400	15	8,931,700	35	92,799,100	253%	309%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	20	8,500,000,000	1	6,563,000	15	6,591,460,990	20	4,527,600,000	35	11,119,080,990	175%	131%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia	2	3,000,000	1	651,600	4	2,331,900	2	1,791,900	6	4,123,800	300%	133%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jamuan makan yang disiapkan	600	29,499,800	110	2,750,000	1056	17,280,000	600	6,600,000	1656	23,880,000	276%	81%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jamuan snack yang disiapkan	396	5,000,000	0		396		396		792		200%	0%
		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan	19	115,000,000	19	31,232,400	38	90,987,200	19	31,422,500	57	122,409,700	300%	106%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah serat kabar/koran yang dibutuhkan	3	90,000,000	3	5,775,000	6	22,536,000	3	22,050,000	9	44,586,000	300%	50%
			Jumlah jenis ATK yang tersedia	65	2,005,000,000	60	3,676,027,100	140	172,581,600	65	5,494,215,200	205	5,666,796,800	315%	283%
			Jumlah jenis penunjang pencetakan KTP El dan KIA (Tinta Full Color Ribbon, HDP Film dan Cleaning Kit)	3		3		0		3		3		100%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80	200,000,000	17	24,746,073	150	296,799,200	80	57,612,750	230	353,411,950	288%	177%

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	k	Rp	K	Rp	k	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3	450.000.000	3	61.832.025	7	462.199.916	3	242.160.000	10	704.659.916	333%	157%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	250.000.000	17	9.484.500	40	53.154.000	20	28.320.000	60	81.474.000	300%	33%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pelindung diri yang tersedia	10	10.000.000	0	0	7	6.750.000	10	0	17	6.750.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Yang Sesuai Standard Kebutuhan Pelayanan Prima.												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor / STNK bermotor roda empat yang terbayarkan	24	7.237.000	9	2.486.700	48	75.692.500	24	12.215.000	72	87.907.500	300%	1235%
			Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda empat yang terbayarkan	10	8.000.000	2		20		10		30		300%	0%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	24	123.750.000	12	44.540.000	48	122.580.000	24	103.500.000	72	226.080.000	300%	183%
			Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	9		5		13		9		22		244%	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub KEG (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	1	750.000,000	1	178.589,989	2	549.612.100	1	360.309,700	3	909.971,800	300%	121%
			Jumlah tenaga pengamanan dan kebersihan kantor yang dibayar	4		4		4		4		8		200%	
		Cakupan keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap	Rata-rata Persentase Keluarga dengan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap (KK, KTPel, KIA, Akta Kelahiran 0-18 thn)												
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap /Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA	37.5	2.771.000,000	39.6	360.590,120	61.64	7.967.746,800	37.5	892.659,200	99.14	8.860.406,000	264%	320%
			Cakupan Jumlah keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK)	100		149.06		200		100		300		300%	
			Persentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El	95		104.7		192		95		277		292%	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/e semester I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan												
		Pencatatan, Pemertaaahan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik	250000	2.141.000.000	76835	338.075.560	350000	1.063.212.000	250000	805.133.000	600000	1.868.345.300	240%	87%
			Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA)	30000		38524		45000		30000		75000	-	250%	
			Terbitnya Kartu Keluarga	260000		102457		475000		260000		735000	-	283%	
			Jumlah operator SIAK dan Admin yang mendukung pelayanan Adminiduk di dinas dan kecamatan yang terbayarkan	60		32		0		60		60	-	100%	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP El	70	50.000.000	42	5.425.000	120	263.127.500	70	8.575.000	190	271.702.500	271%	543%
		Pencatatan, Pemertaaahan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah permohonan yang menerima layanan Surat keterangan pindah, datang, SKTT	27000	320.000.000	17942	29.142.660	54000	72.991.200	27000	62.724.500	83000	198.115.700	300%	42%
		Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan												
		fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah warga yang terfasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon	2500	140.000.000	78	7.946.900	0	0	2000	16.226.700	2000	16.226.700	100%	12%

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PU Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PU s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	ik	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAR	42.7	1,471,000,000	38.9	138,674,840	74.75	1,492,842,780	42.7	332,203,500	117	1,825,045,280	275%	128%
			Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan (Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Pereraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak)	80		61.08		80		80		160		200%	
		Pebyanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan												
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran	65000	685,000,000	27967	123,297,040	125000	698,580,100	65000	305,689,600	190000	1,204,469,700	292%	176%
			Terbitnya Dokumen Akta Kematian	1200		2428		1700		1200		2400		200%	
			Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan	50		6		50		50		100		200%	
			Terbitnya Dokumen Akta perceraian	10		1		10		10		20		200%	
			Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	25		5		25		25		50		200%	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Digitalisasi Arsip Pelayanan Sipil berbasis IT	1	231,000,000	0	14,782,800	2	115,145,900	1	26,313,900	3	141,459,800	300%	61%

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Keg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile penerbitan akta kelahiran	100		71		200		100		300		300%	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan telah didukung dengan Aplikasi khusus	20	1,181,973,200	10	97,976,360	20	3,067,852,580	20	972,389,200	40	3,440,241,780	200%	291%
			Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik	95		85,37		190		95		285		300%	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan												
		Pengalihan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen Database Penduduk yang Valid	5	99,000,000	1	9,675,000	10	48,119,900	5	34,927,000	15	83,045,900	300%	84%
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan	20	100,000,000	10	6,365,000	2	12,603,600	20	41,878,200	22	54,481,800	110%	54%
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang terselesaikan												
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dieranggungjawabkan	Terpeliharanya jumlah unit jaringan SIAK untuk mendukung penyajian data yang akurat	41	770,000,000	35	81,936,360	82	314,086,000	41	295,584,000	129	609,570,000	300%	79%

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Reg (Sub Output)	Target Renstra PD pada akhir tahun 2022		Capaian Kinerja s/d semester I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan	94	185,000,000	53.19	12,146,220	182	233,038,000	94	47,867,000	276	260,840,000	294%	170%
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan												
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir	2	100,000,000	0.5	12,146,220	2	84,335,800	1	47,802,000	3	131,937,800	300%	132%
			JUMLAH				6,174,524,625		32,357,315,466		21,257,208,550		53,609,524,016		

TABEL 2.1
PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUNAN						TARGET TAHUNAN			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		41,714	49,233	53,674	5,553	44,976	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
Pelayanan Pencatatan Sipil														
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUNAN						TARGET TAHUNAN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		33,122	36,189	43,707	46,370	39,826						
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
	Pelayanan Pencatatan Sipil														
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting														
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.												
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		18%	21%	22,7%	22,4%	17,6%						

Dari Tabel 2.1 dapat diterangkan bahwa adanya realisasi yang capaiannya kosong disebabkan karena adanya refocusing yang mengaruskan sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan adanya capaian yang melebihi 100% hal tersebut disebabkan adanya pemohon yang mengajukan cetak ulang KTP EI karena berbagai factor hal tersebut membuat prosentase cetaknya melebihi 100 %, sementara untuk capaian penerbitan KIA masih rendah hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya mesin pencetakan dan pada tahun 2020 sama sekali tidak ada penerbitan/pencetakan KIA.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019 – 2024, ada 2 (dua) sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2020, dan ada 1 (satu) sasaran yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu :

1. Meminimalisir keluhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan dokumen identitas kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, 2022 target penerbitan KTP-EI sebanyak 250.000 keping dan KK sebanyak 260.000. Realisasi untuk pada Semester I tahun 2022 ini penerbitan KTP sebanyak 76.835 keping dan KK sebanyak 102.457 lembar.

2. Terlayannya Hak-hak Status Pribadi dan Status Hukum Bagi Penduduk

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil dengan target penerbitan Akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2020 sejumlah 60.000 lembar, adapun realisasi adalah sebagai berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SMESTER I TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	TARGET 2022	PENCAPAIAN smstr I / 2022
1	Penerbitan Kartu Keluarga	220.000	102.457
2	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	200.000	76.835
3	Surat Pindah Datang	27.000	17.942
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	100.000	38.524
5	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65.000	27.967
6	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	12.000	2.428
7	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		

NO	KEGIATAN	TARGET 2022	PENCAPAIAN smstr I / 2022
	Akta Perkawinan	50	26
	Akta Perceraian	10	4
	Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan ANak	25	22

Sumber Data : Simonek Semester I Tahun 2022

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
1	Perekaman KTP Elektronik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			28,92%	32,74%	37,50%	44,18%	23,70%	24,76%	28,39%	31,51%			
3	Kepernikaan akta kelahiran			35%	39,75%	42,7%	45,64%	38,60%	39,17%	40,00%	41,00%		Prosenase Kepemilikan Akta yang sudah terkonversi ke dalam Database SIAK	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perijinan kerja sama			27,40%	41,10%	68,5%	82,2%	27,40%	27,40%	27,40%	27,40%		Berdasarkan Permendagri No 61 Tahun 2015	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan Admuduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus -menerus, antara lain melalui:
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK.
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP)

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon
5. Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi

b. Faktor Kelemahan Organisasi.

1. Kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai sesuai kebutuhan
2. Belum memadainya sarana dan prasarana

Faktor Peluang Organisasi

- 1) Adanya penerapan nyata Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Noor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Kebijakan Pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukab dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, integritas dan profesional
- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perkembangan teknologi informasi memeberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersbut.

c. Faktor Tantangan Organisasi :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan public. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung beimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan public menjadi sebuah hal yang harus dilakukan.
2. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus dokumen adminsitrası kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan Organisasi Peangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerinbtah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuipaten Cirebon yang bertujuan

untuk mendukung pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance) melalui pelayanan public urusan administrasi kependudukan.

Dalam Menyusun Rencana Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh Misi ke-4 (empat) yaitu *"Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"* untuk terwujudnya Visi Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"*

Untuk mencapai Visi Kabupaten Cirebon seperti tersebut di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugasnya harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan salah satu instansi yang ada di Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon akan memfokuskan kepada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan ke dalam Renstra OPD, maka pada setiap awal tahun masing-masing OPD Menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal Renstra dengan memperhatikan kebutuhan OPD dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang berbeda yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Tahun 2019-2024.

Dengan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut maka dalam penyusunan Renja OPD tahun 2022 harus menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru, sehingga program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 harus tetap sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan oleh Bupati Cirebon dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui sejauh mana relevansi rancangan awal OPD yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.3 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel 2.3
Riview Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No.	Uraian/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Kog/Sub Kog	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Kog/Sub Kegiatan				Pagu Indikator		Berkurang / Bertambah	
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
								Sebelum	Setelah						
	BELANJA DAERAH														
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Calupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap												
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerimaan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk														
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerimaan Dokumen atas Pencatatan Persiswa Kependudukan														
	Pengelolaan Pendaftaran Penduduk														
	Fasilitas Pendaftaran Penduduk														

No.	Urusan/Bid Ur Penerimaan Daerah dan Program/Keg/Sub Kog	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan			Pagu Indikatif	Berkurang /Berlambah
				Disdukkapil	Disdukkapil	Disdukkapil	Disdukkapil	Tolak Uluh	Target			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Disdukkapil	Disdukkapil							
	Pelayanan Pencatatan Sipil			Disdukkapil	Disdukkapil							
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			Disdukkapil	Disdukkapil	85000	85000	Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran	65000	50000	305.889.600	
				Disdukkapil	Disdukkapil	1200	1200	Terbitnya Dokumen Akta Kemabatan	1200	12000		
				Disdukkapil	Disdukkapil	50	50	Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan	50	50		
				Disdukkapil	Disdukkapil	10	10	Terbitnya Dokumen Akta perceraian	10	10		
				Disdukkapil	Disdukkapil	25	25	Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	25	25		
				Disdukkapil	Disdukkapil							
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			Disdukkapil	Disdukkapil	1	1	Digitalisasi Arsip Pelayanan Sipil berbasis IT	1	1	26.313.900	26.313.900
				Disdukkapil	Disdukkapil	100	100	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobilis penerbitan akta kelahiran	100	100		
				Disdukkapil	Disdukkapil							
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Disdukkapil	Disdukkapil							
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan			Disdukkapil	Disdukkapil	5	5	Dokumen Database Penduduk yang Valid	5	5	34.927.000	34.927.000
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Disdukkapil	Disdukkapil	20	20	Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan	20	20	41.678.200	41.678.200
	Kerjasama Pemertabatan Data Kependudukan			Disdukkapil	Disdukkapil							
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi			Disdukkapil	Disdukkapil							

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg Kependudukan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja	Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Berkurang /Bertambah
							Tolok Ukur	Target		
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan			Disdukcapi	Disdukcapi	41	Terpetihkannya jumlah unit jaringan SIAK untuk mendukung penyajian data yang akurat	41	295.584,000	295.584,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Disdukcapi	Disdukcapi					
	Penyusunan Profil Kependudukan			Disdukcapi	Disdukcapi					
	Penyusunan Profil Data Kemiskinan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain			Disdukcapi	Disdukcapi	1	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir	1	47.802.000	47.802.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Disdukcapi	Disdukcapi					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Disdukcapi	Disdukcapi					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Disdukcapi	Disdukcapi	2	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan	2	27.088.600	27.088.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Disdukcapi	Disdukcapi	5	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan (LPPD, LKIP, LAKIP, IKU dan PERKIN)	5	11.000.000	11.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Disdukcapi	Disdukcapi	1	Tersedianya Dokumen Laporan IKM	1	17.704.000	17.704.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Disdukcapi	Disdukcapi	1	Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1		
				Disdukcapi	Disdukcapi					

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Kegi/Sub Kegi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerjs		Indikator Kinerja Program/Kegi/Sub Kegiatan			Pagu Indikatif		Berkurang / Bertambah
				Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	Tolak Ukur	Target	63	7,007,616,000	7,007,616,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Disdukcapi	Disdukcapi	63	63	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	63	63	7,007,616,000	7,007,616,000	-
				Disdukcapi	Disdukcapi	26	26	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26	26			-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1	1	3,877,000	3,877,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Disdukcapi	Disdukcapi	18	18	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselesaikan	18	18	2,786,400	2,786,400	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Disdukcapi	Disdukcapi								-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Disdukcapi	Disdukcapi	15	15	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	15	15	8,931,700	8,931,700	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disdukcapi	Disdukcapi	20	20	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	20	20	4,527,600,000	4,527,600,000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Disdukcapi	Disdukcapi	2	2	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia	2	2	1,791,900	1,791,900	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Disdukcapi	Disdukcapi	600	600	Jumlah jamuan makan yang disiapkan	600	250	6,600,000	6,600,000	-
				Disdukcapi	Disdukcapi	396	396	Jumlah jamuan snack yang disiapkan	396	0			-
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan			Disdukcapi	Disdukcapi	18	18	Jumlah barang cetak yang	18	18	31,422,500	31,422,500	-

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan		Pagu Indikatif		Berburang /Berfambuah	
				Disdukkapal	Disdukkapal	Disdukkapal	Disdukkapal	dibutuhkan	ditubuhkan	Tarjet			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Disdukkapal	Disdukkapal	3	3	Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	3	3	22,050,000	22,050,000
	Penyediaan Saham/Material			Disdukkapal	Disdukkapal	65	65	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Jumlah jenis ATK yang tersedia	65	65	5,494,215,200	5,494,215,200
				Disdukkapal	Disdukkapal	3	3	Jumlah Jenis penunjang pencetakan KTP EI dan KIA (Tinta Full Color Ribbon, HDP Film dan Cleaning Kit)	Jumlah Jenis penunjang pencetakan KTP EI dan KIA (Tinta Full Color Ribbon, HDP Film dan Cleaning Kit)	3	3		
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Disdukkapal	Disdukkapal	80	40	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80	40	57,512,750	130,775,577
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Disdukkapal	Disdukkapal								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Disdukkapal	Disdukkapal	3	3	Jumlah Rekening yang di bayar	Jumlah Rekening yang di bayar	3	3	242,460,000	242,460,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disdukkapal	Disdukkapal	20	20	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	20	28,320,000	28,320,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Disdukkapal	Disdukkapal								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Disdukkapal	Disdukkapal	24	24	Jumlah Pajak Kendaraan/STNK bermotor roda dua yang dibayarkan	Jumlah Pajak Kendaraan/STNK bermotor roda dua yang dibayarkan	24	24	12,215,000	12,215,000
				Disdukkapal	Disdukkapal	10	10	Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda empat yang dibayarkan	Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda empat yang dibayarkan	10	7		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Disdukkapal	Disdukkapal	24	12	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang dibekalkan Bahan Bakar Minyak / BBM	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang dibekalkan Bahan Bakar Minyak / BBM	24	12	103,500,000	103,500,000

No.	Unsur/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja	Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Berkurang /Berambah	
				Disdukcapi	Dieduicapi		Tolok Ukur	Target			
				Disdukcapi	Dieduicapi	9	5	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	9	5	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Disdukcapi	Dieduicapi	1	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	1	1	360.309,700
								Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati			360.309,700
									19,512,154,550	20,187,317,477	575,162,827

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penyelarasan dan penajaman Rencana Kerja Tahun 2022 telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 09 Maret Tahun 2021 yang dihadiri oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang dilaksanakan sejalan dengan keinginan masyarakat, bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hanya sebagian dari usulan masyarakat namun secara keseluruhan sebenarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menggambarkan keinginan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon di tingkat kecamatan ada 17 kecamatan yang mengusulkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berupa penyediaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP El untuk tahun 2022.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Ciwaringin	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
2	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Jamblang	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
3	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Beber	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
4	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Waled	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
5	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Kedawung	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
6	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Klangeran	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
7	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Greged	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
8	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Kapetakan	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
9	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Kaliwedi	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
10	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Pangenan	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
11	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Pabedilan	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
12	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Plered	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
13	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Gempol	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
14	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Panguragan	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
15	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Sedong	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
16	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Susukanlebak	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
17	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan: 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Kecamatan Tengahtani	Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan	1 Paket / 210.000.000	
JUMLAH				3,570,000,000	

Untuk menampung usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menyelaraskan pada program/kegiatan/sub kegiatan yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan 7 (tujuh) kegiatan strategis yaitu :

1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu;
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
3. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
4. Pembinaan Administrasi pencatatan Sipil;
5. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
7. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai instansi pelaksana urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar telah melaksanakan 2 (dua) dari 7 (tujuh) kegiatan strategis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Rencana Kerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai kegiatan / program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran

- a) *Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan;*
- b) *Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap;*

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Thn 2022	Satuan
<i>Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik</i>		<i>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</i>	3,50	<i>Point</i>
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Persen
	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Rata-rata Prosentase Keluarga dengan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap (KK, KTPel, KIA, Akta Kelahiran 0-18 thn)	84	Persen

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon ikut mengambil peran dalam mereliasasikan tema Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.

Untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 telah Menyusun program dan kegiatan yang mengacu pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menyelenggarakan pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar dalam Pelayanan Publik yang terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan

Program dan kegiatan pada tahun 2022 meliputi 5 program 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 13 Penyediaan Bahan/Material
 - 14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**
 - 6. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**
 - 20 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - 21 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 22 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- 7. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**
 - 23 Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
- 3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**
- 8. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**
 - 24 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - 25 Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
- 9 Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**
 - 26 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 27 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 10 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 - 28 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 29 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
- 11 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 - 30 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**
- 12 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**
 - 31 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 terlampir.

**TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Usan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatiff		Berlurang /Bertambah		
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah			
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Terbnyanya Kartu Penduduk Elektronik	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
Disdukkcapil				Disdukkcapil	250000	250000	Terbnyanya Kartu Penduduk Elektronik	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	805.133.000	1.305.133.000	500.000.000	
Disdukkcapil				Disdukkcapil	30000	30000	Terbnyanya Kartu Identitas Anak (KIA)	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Terbnyanya Kartu Keluarga	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
Disdukkcapil				Disdukkcapil	280000	280000	Terbnyanya Kartu Keluarga	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
Disdukkcapil				Disdukkcapil	60	60	Jumlah operator SIAK dan Admin yang mendukung pelayanan Adminiduk di dinas dan kecamatan yang terbanyakan	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP E-I	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
Disdukkcapil				Disdukkcapil	70	70	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP E-I	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	8.575.000	8.575.000	
Disdukkcapil				Disdukkcapil	27000	27000	Jumlah pemohon yang menerima Surat keterangan pindah, datang, SKTT	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	62.734.500	62.734.500	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Jumlah pemohon yang menerima Surat keterangan pindah, datang, SKTT	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
Disdukkcapil				Disdukkcapil	27000	27000	Jumlah pemohon yang menerima Surat keterangan pindah, datang, SKTT	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			

No.	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berulang /Bertambah
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
								Sebelum	Setelah					
	Facilitasi Pendaftaran Penduduk			Disdukcapi	Disdukcapi	2000	2000	Jumlah warga yang terfasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon	Jumlah warga yang terfasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon	2000	200	16.226.700	16.226.700	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Disdukcapi	Disdukcapi									
	Pelayanan Pencatatan Sipil			Disdukcapi	Disdukcapi									
	Pencatatan, Peningkatan dan Peningkatan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting			Disdukcapi	Disdukcapi	65000	65000	Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran	Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran	65000	60000	305.889.600	305.889.600	
				Disdukcapi	Disdukcapi	1200	1200	Terbitnya Dokumen Akta Kematian	Terbitnya Dokumen Akta Kematian	1200	12000			
				Disdukcapi	Disdukcapi	50	50	Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan	Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan	50	50			
				Disdukcapi	Disdukcapi	10	10	Terbitnya Dokumen Akta perceraian	Terbitnya Dokumen Akta perceraian	10	10			
				Disdukcapi	Disdukcapi	25	25	Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	25	25			
				Disdukcapi	Disdukcapi									
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Digitalisasi Arsip Pelayanan Sipil berbasis IT	Digitalisasi Arsip Pelayanan Sipil berbasis IT	1	1	26.313.900	26.313.900	
				Disdukcapi	Disdukcapi	100	100	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile penerbitan akta kelahiran	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile penerbitan akta kelahiran	100	100			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Disdukcapi	Disdukcapi									

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerjanya		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang / Bertambah	
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tercap		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Setelah						
	Unsur/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	Dokumen Database Penduduk yang Valid	Dokumen Database Penduduk yang Valid	5	5	34,927,000	34,927,000
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Disdukcapi	Disdukcapi	20	20	20	20	Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan	20	20	41,878,200	41,878,200
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Disdukcapi	Disdukcapi										
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Disdukcapi	Disdukcapi										
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan		Disdukcapi	Disdukcapi	41	41	41	41	Terpeliharanya jumlah unit jaringan SIAG untuk mendukung penyajian data yang akurat	Terpeliharanya jumlah unit jaringan SIAG untuk mendukung penyajian data yang akurat	41	41	295,584,000	295,584,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Disdukcapi	Disdukcapi										
	Penyusunan Profil Kependudukan		Disdukcapi	Disdukcapi										
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	1	1	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir	1	1	47,802,000	47,802,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Disdukcapi	Disdukcapi										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Disdukcapi	Disdukcapi										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Disdukcapi	Disdukcapi	2	2	2	2	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan	2	2	27,088,600	27,088,600

No.	Usaha/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berurang /Bertambah
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target		Sebelum	Setelah	
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			Disdukkapil	Disdukkapil	5	5	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan (LPPD, LKPI, LAKIP, IKU dan PERKIN)	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan (LPPD, LKPI, LAKIP, IKU dan PERKIN)	5	5	11,000,000	11,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Disdukkapil	Disdukkapil	1	1	Tersedianya Dokumen Laporan IKM	Tersedianya Dokumen Laporan IKM	1	1	17,704,000	17,704,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Disdukkapil	Disdukkapil	1	1	Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Disdukkapil	Disdukkapil	63	63	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	63	63	7,007,616,000	7,007,616,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Disdukkapil	Disdukkapil	26	26	Jumlah dokumen laporan keuangan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26	26			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Disdukkapil	Disdukkapil	1	1	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1	1	3,877,000	3,877,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Disdukkapil	Disdukkapil	16	16	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselesaikan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselesaikan	16	16	2,786,400	2,786,400	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Kegi/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang / Bertambah	
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Setelah						
	Urusan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Kegi/Sub Keg													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Ditukcapai	Ditukcapai	15	15	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	15	15	8,931,700	8,931,700		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Ditukcapai	Ditukcapai	20	20	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	20	20	4,527,600,000	4,527,600,000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Ditukcapai	Ditukcapai	2	2	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia	2	2	1,791,900	1,791,900		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Ditukcapai	Ditukcapai	600	600	Jumlah jamuan makan yang disiapkan	Jumlah jamuan makan yang disiapkan	600	250	6,600,000	6,600,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Ditukcapai	Ditukcapai	386	386	Jumlah jamuan snack yang disiapkan	Jumlah jamuan snack yang disiapkan	396	0				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Ditukcapai	Ditukcapai	19	19	Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan	Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan	19	19	31,422,500	31,422,500		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Ditukcapai	Ditukcapai	3	3	Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	3	3	22,050,000	22,050,000		
	Penyediaan Bahan/Material		Ditukcapai	Ditukcapai	65	65	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Jumlah jenis ATK yang tersedia	65	65	5,494,215,200	5,494,215,200		
	Penyediaan Bahan/Material		Ditukcapai	Ditukcapai	3	3	Jumlah Jenis penunjang pencetakan KTP (E) dan KIA (Tinta Full Color Ribbon, HDP Film dan Cleaning Kg)	Jumlah Jenis penunjang pencetakan KTP (E) dan KIA (Tinta Full Color Ribbon, HDP Film dan Cleaning Kg)	3	3				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Ditukcapai	Ditukcapai	80	40	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80	40	57,812,750	130,775,577	73,162,827	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Keg/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Berkurang / Bertambah
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Setelah					
	Usuan/Bid Ur Pemerintah Daerah dan Program/Keg/Sub Keg		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		Disdukcapi	Disdukcapi									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Disdukcapi	Disdukcapi	3	3	Jumlah Rekening yang di bayar	Jumlah Rekening yang di bayar	3	3	242.460.000	242.460.000	
	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor		Disdukcapi	Disdukcapi	20	20	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	20	28.320.000	28.320.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		Disdukcapi	Disdukcapi									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Disdukcapi	Disdukcapi	24	24	Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda dua yang terbayarkan	Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda dua yang terbayarkan	24	22	12.215.000	12.215.000	
			Disdukcapi	Disdukcapi	10	10	Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda empat yang terbayarkan	Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda empat yang terbayarkan	10	7			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Disdukcapi	Disdukcapi	24	12	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	24	12	103.500.000	103.500.000	
			Disdukcapi	Disdukcapi	9	5	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	9	5			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Disdukcapi	Disdukcapi	1	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	1	1	360.309.700	360.309.700	
											19.812.154.850	20.197.317.477	575.152.627

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yaitu pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019 - 2024. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2022 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 mencakup 32 sub kegiatan dalam 5 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mempersyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan Renstra;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas;
7. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022. Selama realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon tahun 2022, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon

7.2. Kaidah Pendanaan

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini yaitu:

1. Peningkatan atau sekurang-kurangnya dapat dipertahankan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan

peraturan perundangan-undangan, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip di atas, diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan dan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Semoga Program kerja yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat tercapai.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Lampiran I

Berita Acara Verifikasi/Desk Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022

Nomor : 051.2/.../PPM/2022

Tanggal : 24 Juli 2022

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPPETBANGDA TERHADAP KEBIJAKAN RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Jenis Kegiatan	HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI RENJA PD			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apakah Tidak perlu
		Ada	Tidak ada		
1	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Penyusunan Agenda Kerja.	√		Ada namun SK Tim belum ditandatangani Pa Bupati. Dan belum ada agenda kerja Tim	Agar diproses SK Bupati dan Tim Penyusun dan dibuat jadwal agenda kerja Tim
2	Pencermatan isi latar belakang pengertian tingkat Rentan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja KL dan Renja provinsi.	√		Sebelum atau di atas Bab I Pendahuluan agar dicantumkan ✓ LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI OREBON NOMOR TANGGAL TENTANG PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022 ✓ Penjelasan nilai strategis Renja PD pada sub Bab latar belakang (halaman 2) itu baik agar diperbaiki karena yang diisikan itu merupakan nilai Strategis RKPD ✓ Belum ada bahan keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, Renja KL	Agar diperbaiki dan ditindaklanjuti
3	Pengolahan data dan informasi	√		Data Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d thn 2021 dan data capaian kinerja s/d tahun 2022 pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan di Tabel 1 Bab II agar meragukan nilai capaian kinerjanya - Data realisasi capaian SDGs dan IKK yang terkait akta kelahiran agar diragukan, mohon dicek lagi sesuai data profil kependudukan tiap tahun - data capaian kinerja pelayanan semester 1 tahun 2022 di halaman 27 terkait data akta cahi lainnya belum sesuai dgn data update Simonek	Agar diperbaiki dan ditindaklanjuti lebih akurat data 2019-2021 data yg ada dari data kepu
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja-PD kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra PD kabupaten	√		Namun Data Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d thn 2021 dan data capaian kinerja s/d tahun 2022 pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan di Tabel 1 Bab II agar meragukan nilai capaian kinerjanya	Agar diperbaiki dan ditindaklanjuti lebih akurat 2019-2021
5	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√			
6	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kabupaten	√			
7	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	√			

8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/		√	√	Belum dicantumkan kapan pelaksanaan Forum PD Disdukcapil Agar dicantumkan pada Sub Bab 2.5
9.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			Usulan masyarakat pada Musrenbang kec sudah dicantumkan pada Sub Bab 2.5
9.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah		√	√	Target perubahan capaian penerbitan Tahun 2022 untuk KTPel, KIA, KK, akta kematian agar dicek dan diperbaiki lagi Agar dicek dan diperbaiki kembali
9.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			Diantaranya bahwa untuk meningkatkan cakupan KIA dan perekaman KTPel perlu didukung oleh intervensi kegiatan dan anggaran dari OPD terkait
9.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati		√	√	Pagu anggaran sub kegiatan yang ada tambahan dicantumkan setelah disepakati oleh TAPD Agar diperbaiki dan ditindaklanjuti
10	Peneilaian terhadap Kebijakan Nasional	√			Ada di Bab III
11	Perumusan tujuan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu strategi atau isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD	√			Ada pada Bab III
12	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			Ada pada Bab IV Tabel 4.2, namun target komponen indikator sasaran dinas cakupan keluarga yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2022 perlu disesuaikan lagi Agar disesuaikan targetnya
13	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten	√			
14	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
15	Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 yang telah disahkan	√			Karena dasar hukum perubahan Renja PD tahun 2022 adalah dengan keputusan bupati. Maka tidak perlu mencantumkan Nama Sekda atau tidak perlu diundangkan dalam berita daerah Agar diperbaiki dan ditindaklanjuti

Sumber, 24 Juli 2022

a.n. KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



TEDY TRI SUSILO S.STP M.Si
NIP. 19791021 199912 1 001